

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- kansil. (2011). Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Kebijakan Pemerintah. Alfabeta, 191.
- Koopmans, T. C. (1969). Objectives, Constraints, and Outcomes in Optimal Growth Models. In K. A. Fox, J. K. Sengupta, & G. V. L. Narasimham (Eds.), *Economic Models, Estimation and Risk Programming: Essays in Honor of Gerhard Tintner* (pp. 110–132). Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-46198-9\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-642-46198-9_7)
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3(01).
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3(01).
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Mulyana, Deddy. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. (2010). Memahami Metode Kualitatif. Alfabeta, 104-106.
- Sugiyono. (2012). Definisi Oprasional. Alfabeta, 31.
- Umanailo, M. (2003). Paradigma Konstruktivis. *Paradigma*, 75.

### Jurnal:

- Akbar, D. S. (2018). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>

- Amiran, S. (2016). EFEKTIFITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN DI PAUD NAZARETH OESAPA. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12367>
- Apriani, R., & Sakban, A. (2019). KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 34. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.672>
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Elviandri & Indra Perdana. (2021). PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). *JOURNAL EQUITABLE*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Haris, A. (2016). KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM OTONOMI DESA. *PERSPEKTIF*, 5(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v5i1.168>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Muslimah, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato. *Journal on Education*, 5(2), 4987–4999. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1231>
- Neyasyah, M. S. (2019). KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.19-34>
- Purnamasari, G. C. (2019). PERGESERAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-

- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI BPD DESA KUNJANG). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161–174.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174>
- Rajagukguk, J. S. P., & Sugiono, L. (2020). TINJAUAN LITURGIS UNSUR-UNSUR IBADAH PENTAKOSTA TERHADAP KEDEWASAAN ROHANI. *Matheo : Jurnal Teologi/Kependetaan*, 10(1), 37–51.  
<https://doi.org/10.47562/matheo.v10i1.101>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Wibawa, A. L. A., Widiati, I. A. P., & Dewi, A. A. S. L. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 444–449. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>
- Wijayanto, D. E. (2014). HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. *Jurnal Independent*, 2(1), 40.  
<https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Yuhandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan PERDES di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>

## **Produk Hukum:**

Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945

iPembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena Sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa.

Mandat dari Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembuatan produk hukum di Desa

Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa.

PERBUP Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.